

Evaluasi Pengelolaan Program KIP Kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten: Pendekatan Model CIPP

Rizal Bahtiar¹, Arif Nugroho²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

¹ewokprakarsa@gmail.com, ²ariyul88@gmail.com

Corresponding author: ewokprakarsa@gmail.com

Submitted: 22/06/2025; Revised: 07/08/2025; Published: 19/08/2025

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.365>

Abstract

This study aims to evaluate the management of the Indonesia Smart Card for Higher Education (KIP Kuliah) Program at the School of Public Administration (STIA) Banten using the CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product). The KIP Kuliah Program is a government initiative to provide access to higher education for underprivileged yet high-achieving students. This research employs a descriptive qualitative method through observation, interviews, documentation, and interactive data analysis based on the Miles and Huberman model. The results show that, in terms of context, the program aligns with the needs of STIA Banten students. However, in the input aspect, there are still limitations in human resources and the digital system has not been optimized. The implementation process lacks transparency, with administrative selection involving minimal field verification and uneven dissemination of information. Regarding the product, the program has provided financial assistance and academic motivation, but it has not yet produced a sustained improvement in student performance. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of program managers, develop integrated digital information systems, and ensure continuous monitoring to achieve program effectiveness and sustainability.

Keywords: KIP Kuliah, Program Evaluation, CIPP Model, Higher Education Access.

Abstrak

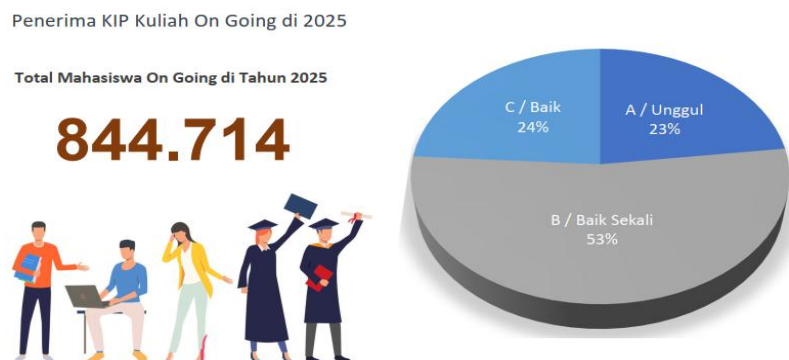
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan Program Kartu Indonesia Pintar Perguruan Tinggi (KIP Kuliah) di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Banten menggunakan model evaluasi CIPP (Konteks, Input, Proses, Produk). Program KIP Kuliah merupakan inisiatif pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu namun berprestasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data interaktif berdasarkan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kontekstual, program ini telah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa STIA Banten. Namun, pada aspek input, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan sistem digital belum optimal. Proses implementasinya kurang transparan, dengan seleksi administrasi yang minim verifikasi lapangan dan penyebaran informasi yang tidak merata. Dari sisi produk, program ini telah memberikan bantuan dana dan motivasi akademik, tetapi belum menghasilkan peningkatan berkelanjutan dalam kinerja mahasiswa. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas pengelola program,

pengembangan sistem informasi digital terpadu, dan pemantauan berkelanjutan untuk mencapai efektivitas dan keberlanjutan program.

Kata Kunci: KIP Kuliah, Evaluasi Program, Model CIPP, Akses Pendidikan Tinggi.

Pendahuluan

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah hadir sebagai salah satu langkah afirmatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang memiliki potensi akademik baik. Sesuai dengan astacita yang tertuang dalam Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto tahun 2025 sampai dengan 2029 KIP Kuliah memegang peranan strategis dalam mendukung visi nasional memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul, pemerataan kesempatan belajar, serta penguatan kesetaraan gender dan perlindungan bagi kelompok rentan. Program ini mencakup pembiayaan pendidikan berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta bantuan biaya hidup yang langsung diberikan kepada mahasiswa penerima. Kebijakan KIP Kuliah dirancang untuk menjembatani kesenjangan akses pendidikan yang masih terjadi akibat faktor ekonomi, sekaligus mendorong peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan cakupan regulasi yang ketat, syarat penerima yang terverifikasi secara nasional, dan alur penetapan berbasis sistem daring, pemerintah berharap agar program ini dapat terlaksana secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

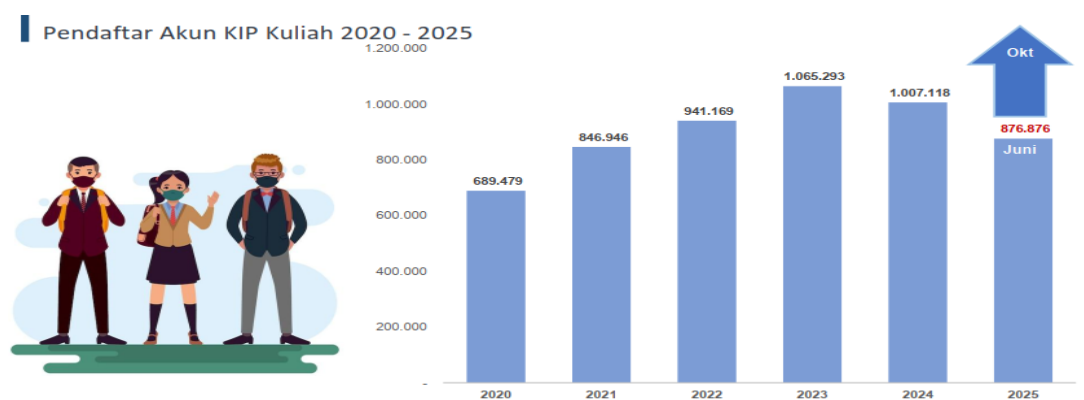


Gambar 1. Penerima Kip Kuliah Ongoing Tahun 2025

(Sumber data : PPAPT Kemendikstekt, 2025)

Gambar di atas menunjukkan jumlah mahasiswa yang menerima KIP Kuliah yang masih aktif (masih aktif) di tahun 2025, dengan total sebanyak 844.714 siswa. Sebagian besar dari data ini berasal dari program studi dengan akreditasi B/Baik Sekali sebesar 53%, diikuti oleh program studi dengan akreditasi C/Baik sebesar 24%, dan sisanya sebanyak 23%.

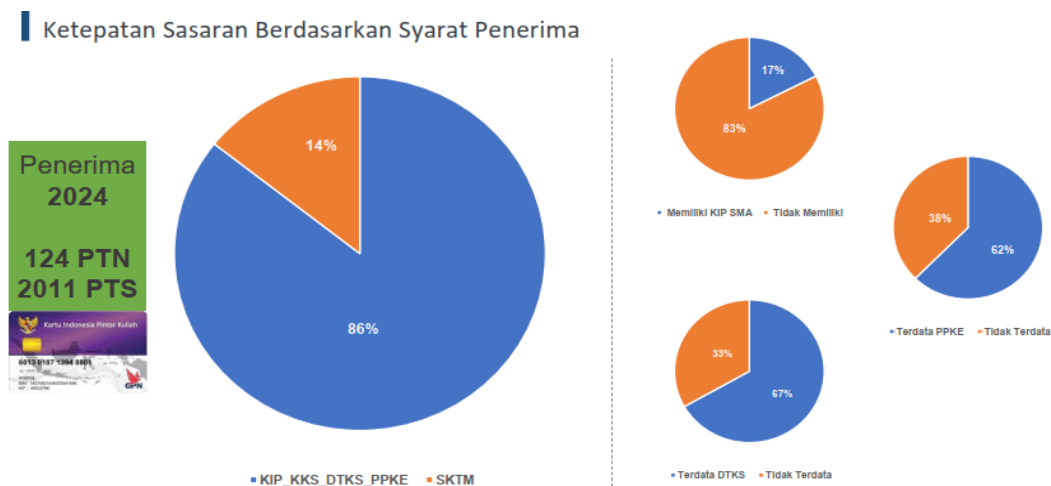
Gambar 2. Pendaftar Akun Kip Kuliah 2020-2025



(Sumber data : PPAPT Kemendiknas, 2025)

Gambar di atas menjelaskan tentang jumlah pendaftar akun KIP Kuliah meningkat secara signifikan dari tahun 2020 hingga 2025, seperti yang ditunjukkan pada data di atas yaitu terdapat jumlah pendaftar sebanyak 689.479 pada tahun 2020, meningkat menjadi 846.946 pada tahun 2021, 941.169 pada tahun 2022, dan 1.065.293 pada tahun 2023. Namun, ada sedikit penurunan menjadi 1.007.118 pada tahun 2024, tetapi jumlah pendaftar pada tahun 2025 sudah mencapai 876.876, dan diperkirakan akan terus meningkat hingga Oktober. Data menunjukkan bahwa siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu semakin tertarik untuk mengambil bagian dalam program KIP Kuliah dalam upaya mendapatkan pendidikan tinggi yang lebih murah.

Gambar 3. Ketepatan Sasaran Berdasarkan Penerima



(Sumber data : PPAPT Kemendiksanstek, 2025)

Data ketepatan sasaran penerima KIP Kuliah berdasarkan syarat kelayakan di tahun 2024 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selain itu, terlihat bahwa 17% penerima memiliki KIP SMA dan 83% tidak, 67% memiliki DTKS dan 33% tidak, 62% terdata dalam PPKE dan 38% tidak. Sementara 14% lainnya hanya menggunakan SKTM. Data ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa lebih banyak siswa yang mengikuti program KIP Kuliah berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, meskipun beberapa siswa belum terdaftar secara resmi.

Meskipun program KIP Kuliah telah menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas kesempatan belajar di perguruan tinggi, dalam pelaksanaannya di berbagai kampus, termasuk Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Banten, tetap menghadapi sejumlah tantangan yang tidak dapat diabaikan. Berdasarkan laporan hasil monitoring dan sosialisasi KIP Kuliah tahun 2025, masih ditemukan beberapa persoalan yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap program ini. Persoalan tersebut mencakup pemotongan dana bantuan biaya hidup, pungutan tambahan di luar ketentuan resmi, penahanan buku tabungan atau kartu ATM milik mahasiswa penerima, hingga penetapan mahasiswa penerima yang tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan. Situasi ini tentu saja berpotensi menyalahi esensi awal KIP Kuliah sebagai sarana membantu mahasiswa

berprestasi dari keluarga kurang mampu agar dapat menyelesaikan studi tanpa terbebani kendala biaya seperti pada data di bawah ini:

Tabel 1. Data Pendaftar dan Penerima Program Kip Kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

Tahun	Jumlah Mahasiswa Pendaftar	Jumlah Mahasiswa yang di ajukan	Mahasiswa Lolos Seleksi KIP Kuliah	Prodi yang Dituju	
				Administrasi Publik/Negara	Administrasi Bisnis/Niaga
2020	75	26	25	15	10
2021	200	117	103	44	59
2022	241	126	109	47	62
2023	375	167	153	89	64
2024	350	172	139	74	65
Total	1.241	608	529	269	260

(Sumber : Ketua Tim Pengelola Kip Kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, 2025)

Berdasarkan tabel di atas Selama kurun waktu lima tahun, mulai dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah mahasiswa yang mendaftar Program KIP Kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Banten menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 75 mahasiswa mendaftar, dengan 26 di antaranya diajukan sebagai calon penerima, dan akhirnya 25 mahasiswa dinyatakan lolos seleksi. Dari jumlah tersebut, 15 mahasiswa memilih Program Studi Administrasi Publik/Negara, dan 10 lainnya memilih Program Studi Administrasi Bisnis/Niaga.

Permasalahan seperti keterbatasan informasi kepada calon mahasiswa, belum adanya sistem digitalisasi untuk pengelolaan data, kurangnya pelatihan bagi pengelola program, serta belum tersusunnya indikator evaluasi yang sistematis menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian. Selain itu, belum diketahui secara pasti sejauh mana Program KIP Kuliah telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan prestasi akademik dan keberlanjutan studi mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten.

Tujuan Program KIP Kuliah, yaitu memberikan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu namun berprestasi, sangat sesuai dengan

kebutuhan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten. Mayoritas mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah, sehingga bantuan finansial dari KIP Kuliah menjadi solusi strategis untuk menurunkan angka putus kuliah akibat faktor biaya. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal pendataan dan identifikasi calon penerima yang benar-benar layak, karena tidak semua mahasiswa dengan kondisi ekonomi lemah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kesiapan sumber daya di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten dalam mengelola Program KIP Kuliah masih perlu ditingkatkan. Meskipun terdapat tim pengelola beasiswa, belum seluruhnya memiliki pelatihan khusus terkait teknis pengelolaan dan pelaporan program. Selain itu, sistem administrasi masih banyak dilakukan secara manual, mulai dari pengumpulan berkas hingga verifikasi data. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan KIP Kuliah secara digital menyebabkan proses menjadi lambat dan berisiko kesalahan input. Fasilitas dan perangkat lunak pendukung juga belum memadai. Hal ini berdampak pada keterbatasan transparansi dan efektivitas pemantauan.

Proses pelaksanaan program telah dilakukan sesuai petunjuk teknis dari pusat, namun belum berjalan optimal. Seperti Sosialisasi KIP Kuliah seringkali hanya disampaikan melalui media internal atau pada saat awal penerimaan mahasiswa baru. Hal ini membuat sebagian calon mahasiswa kurang mendapatkan informasi lengkap mengenai prosedur dan manfaat program. Proses seleksi masih berbasis dokumen fisik dan pertimbangan administratif, yang membuka ruang subjektivitas dan keterbatasan verifikasi lapangan serta Monitoring terhadap mahasiswa penerima KIP Kuliah dilakukan secara terbatas. Belum ada sistem penilaian berkala terhadap prestasi akademik maupun kondisi sosial mahasiswa setelah menerima bantuan.

Dan secara umum, dampak Program KIP Kuliah dirasakan positif oleh mahasiswa penerima. Banyak dari mereka merasa terbantu secara finansial, mampu membeli buku, mendukung transportasi, bahkan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam aspek akademik, beberapa mahasiswa penerima menunjukkan peningkatan motivasi dan

prestasi, karena tidak lagi terbebani biaya kuliah. Namun demikian, masih terdapat mahasiswa penerima KIP Kuliah yang mengalami penurunan performa atau bahkan berhenti kuliah. Hal ini disebabkan oleh masalah non-akademik seperti tekanan keluarga, keharusan bekerja sambil, atau kurangnya pendampingan psikologis dan akademik. Selain itu, manfaat non-akademik seperti peningkatan rasa percaya diri dan partisipasi organisasi juga tercatat di beberapa penerima aktif.

Pada penjelasan latar belakang perlunya evaluasi Program KIP Kuliah, khususnya di perguruan tinggi swasta seperti Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten. Ditekankan bahwa KIP Kuliah merupakan salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik. Namun, dalam implementasinya, tantangan dalam pengelolaan program ini masih sering terjadi, baik dari segi seleksi, transparansi, monitoring, hingga dampaknya terhadap mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengelolaan Program KIP Kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten secara menyeluruh menggunakan pendekatan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang efektivitas kebijakan ini.

Tinjauan Pustaka

Evaluasi program mengalami perkembangan yang berarti sejak *Ralph Tyler, Scriven, John B. Owen, Lee Cronbach, Daniel Stufflebeam, Marvin Alkin, Malcolm Provus, R. Brinkerhoff dan lainnya*. Banyaknya kajian evaluasi program yang membawa implikasi semakin banyaknya model evaluasi yang berbeda cara dan penyajiannya, namun jika ditelusuri semua model bermuara kepada satu tujuan yang sama yaitu menyediakan informasi *decision* atau keputusan bagi pengambil kebijakan (Malik Ibrahim, 2018).

Menurut Philips (1981) dalam bukunya yang berjudul *Handbook of Training Evaluation and Measurement Methods* yang di kutip (Malik Ibrahim, 2018) dari memberi ilustrasi penerapan tujuh macam model evaluasi program yaitu: 1). *Kirkpatrick approach*,

model ini banyak diterapkan untuk mengevaluasi program pelatihan. Dalam model ini dikembangkan kerangka kerja pengumpulan data penelitian yang secara konseptual mengacu pada tahap-tahap belajar. Konsep tersebut selanjutnya dinamakan empat level evaluasi yang terdiri dari: reaction, learning, behavior, and result. Evaluator behavior kemudian direvisi menjadi transfer. 2) CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) model ini dikembangkan oleh *National Study Committee on Evaluation of Phi Delta Kappa*. Penggagas model ini adalah *Stufflebeam*.

Menurut klasifikasi model berdasarkan tujuan, model ini termasuk model management analysis yang bertujuan untuk mengevaluasi keputusan/kebijakan seorang manajer. Dalam perkembangan lebih lanjut, model ini banyak digunakan untuk mengevaluasi program pendidikan. Komponen evaluasi product pada program jangka panjang diperluas lagi menjadi evaluasi impact, effectiveness, sustainability dan transportability. 3) *The Bell System approach*. Model ini mirip dengan model evaluasi 4 level dari Kirkpatrick tetapi evaluasi lebih banyak dilakukan pada dampaknya saja. Data evaluasi diklasifikasikan menjadi empat yaitu: *reaction outcomes, capability outcomes, application outcomes, and worth outcomes*. 4) *The CIRO approach*. Model ini mirip dengan CIPP namun evaluasi proses diganti dengan reaksi. CIRO merupakan singkatan dari *Context evaluation, Input evaluation, Reaction evaluation and Outcome evaluation*. 5) *Saratoga Institute approach*. Model evaluasi ini hampir sama dengan model evaluasi 4 level dari Kirkpatrick yang digunakan untuk mengevaluasi program pelatihan. Pengumpulan data evaluasi program diklasifikasikan menjadi 4 macam juga yaitu: *training satisfaction, learning change, behavior change, dan organizational change*. 6) *The IBM approach*. Model evaluasi ini hampir sama dengan model evaluasi 4 level dari Kirkpatrick. Data yang dikumpulkan terdiri dari: *reaction, testing, application, business results*. 7) *Xerox approach*, model ini agak berbeda dengan model yang lain. Kesamaan terletak pada jumlah klasifikasi data yang digunakan. *Xerox approach* mengklasifikasikan data evaluasi menjadi 4 macam, yaitu: *entry capability, end-of-course performance, mastery job performance, and organizational performance*.

Menurut (Stufflebeam et. al., 2003) Model Evaluasi CIPP dirancang untuk memberikan informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai efektivitas suatu program. agar evaluator dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik untuk perbaikan dan pengembangan program di masa depan. Adapun beberapa indikator dan tujuannya seperti : a) Evaluasi konteks (*Context Evaluation*) : Menilai lingkungan atau konteks di mana program dilaksanakan., Menentukan kebutuhan, masalah dan peluang yang ada, Identifikasi tujuan dan sasaran program. b) Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*) : Analisis sumber daya yang tersedia untuk program, seperti pendanaan, tenaga kerja, dan material, Meninjau rencana dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan program, Pastikan masukan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan konteks. c) Evaluasi proses (*Process Evaluation*) : Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program, Identifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi selama implementasi, Dan Mengukur sejauh mana program dilaksanakan sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. d) Evaluasi Produk (*Product Evaluation*) : Mengukur hasil atau dampak program setelah pelaksanaannya, Evaluasi apakah tujuan dan sasaran program telah tercapai, Identifikasi dampak jangka pendek dan jangka panjang dari program terhadap peserta atau masyarakat. Informasi yang diperoleh dari evaluasi model CIPP ini merupakan umpan balik terhadap proses hasil belajar megajar yang telah dilaksanakan dan umpan balik ini akan menjadi tolok ukur untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar selanjutnya (Bhakti, 2017).

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) turut serta dalam meluncurkan program ini dengan berbagai kebijakan, termasuk pemberian bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria tertentu. Ada empat kategori mahasiswa yang berhak mendapatkan KIP Kuliah, pertama, lulusan SMA/SMK/ sederajat tahun berjalan dan dua tahun terakhir yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Rini et al., 2024). Menurut (Situmorang, 2022) Kartu Indonesia Pintar yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya akan efektif dan sesuai dengan tujuannya apabila masyarakat memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan dengan cara menggunakan dana KIP ini dengan baik. Pemerintah juga berharap KIP

mampu membantu masyarakat yang tidak mampu dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka agar dapat membangun generasi yang unggul dan mendapatkan layanan pendidikan yang layak.

Sudah sepatasnya pemerintah menempatkan komitmen bidang pendidikan tinggi sebagai prioritas pembangunan negara. Dengan adanya Program ini (PIP) tentunya membantu mahasiswa yang dinyatakan lolos di perguruan tinggi dengan bentuk bantuan berupa KIP-K sebagai sebuah pembuktian upaya yang diberikan oleh negara dalam rangka menyejahterakan warganya untuk memperjuangkan pendidikan tinggi. KIP Kuliah akan memberikan sebuah jaminan pasti proses pendidikan di perguruan tinggi dengan memberikan kebebasan dalam biaya kuliah dan beberapa biaya hidup setiap semester bagi mahasiswa yang memenuhi syarat yang tersedia (Aidah, 2022). Sedangkan menurut (Suganda et al., 2022) Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) berdasarkan PERMENDIKBUD No. 10 Tahun 2020 merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan Pemerintah melalui program KIP Kuliah agar diperoleh akses yang luas dalam belajar untuk peserta didik dan Mahasiswa baru dari keluarga miskin atau rentan miskin.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran (Rantung, 2024). Kebijakan publik merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik yang bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk memilih tindakan tertentu, tidak melakukan sesuatu, atau mengambil tindakan tertentu. Kebijakan publik adalah sesuatu yang apa pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Irmawati et al., 2024).

Menurut (Meutia, 2017) Jenis jenis Kebijakan Publik tergantung pada kriteria klasifikasinya, kebijakan publik terdiri dari berbagai jenis. Ada kebijakan publik yang diklasifikasikan menurut sektor ekonomi yang dilayani : 1)Kebijakan distributif :

Kebijakan-kebijakan ini berkaitan dengan tarif atau pajak, lahan publik, alokasi fasilitas publik, dan sebagainya, 2) Kebijakan substantif versus kebijakan procedural. Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan procedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan. 3) Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya lengkap pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran. 4) Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik.

Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini menggunakan Model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) untuk bertujuan mengidentifikasi efektivitas pengelolaan Program KIP Kuliah secara menyeluruh, dengan melihat keterkaitan antara kebutuhan program, kesiapan institusi, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang dicapai. Adapun dalam beberapa model tersebut peneliti menjelaskan sebagai mana pada di bawah ini :

1. *Context* (Konteks)

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, terutama dari wilayah Banten dan sekitarnya. Hal ini diperkuat dengan data profil mahasiswa yang menunjukkan bahwa banyak dari mereka berasal dari keluarga dengan pekerjaan informal dan pendapatan di bawah rata-rata UMR. Oleh karena itu, kehadiran Program KIP Kuliah sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan studi mereka.

Namun, dari sisi kebutuhan, belum semua mahasiswa dari latar belakang ekonomi lemah terakomodasi dalam program ini. Salah satu penyebab utamanya adalah tidak semua calon mahasiswa tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi salah satu syarat administratif. Hal ini menjadi kendala dalam proses seleksi yang bersifat administratif, karena kondisi riil di lapangan tidak sepenuhnya tercermin dari data formal.

Jadi dapat di simpulkan bahwa Kesesuaian antara kebutuhan sosial mahasiswa dan tujuan program cukup tinggi. Namun, belum adanya pemetaan kebutuhan berbasis data institusional menyebabkan beberapa mahasiswa rentan tidak tersentuh program meskipun memenuhi kriteria secara substansi.

2. *Input* (Masukan)

Dari aspek input, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten sudah memiliki unit pengelola beasiswa, namun kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam unit ini masih terbatas. Banyak dari petugas belum mendapatkan pelatihan teknis terkait pengelolaan dan pelaporan KIP Kuliah secara profesional. Proses pengajuan, verifikasi, dan pelaporan masih dilakukan secara manual, yang memperbesar peluang terjadinya keterlambatan atau kesalahan administratif.

Selain itu, infrastruktur pendukung seperti sistem informasi beasiswa digital belum tersedia secara memadai. Data mahasiswa, pemantauan progres akademik, dan dokumentasi pelaporan masih dilakukan dengan pendekatan konvensional. Hal ini berimbas pada rendahnya efektivitas koordinasi antarbagian yang terkait dengan program.

Maka dari itu dapat dinyatakan Keterbatasan input berdampak langsung pada kinerja pelaksanaan program. Tanpa pelatihan dan sistem informasi yang kuat, kualitas layanan menjadi tidak optimal dan berisiko menurunkan kepercayaan mahasiswa terhadap program.

3. *Process* (Proses Pelaksanaan)

Proses pelaksanaan Program KIP Kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten meliputi tahap sosialisasi, seleksi, verifikasi, dan monitoring. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sosialisasi program masih bersifat pasif, terbatas pada informasi lisan saat pendaftaran mahasiswa baru, atau melalui papan pengumuman kampus. Belum ada pendekatan digital seperti website atau media sosial kampus yang dimanfaatkan secara aktif untuk menyebarkan informasi KIP Kuliah secara luas dan transparan.

Tahap seleksi penerima bantuan dilakukan secara administratif, dengan mengandalkan dokumen seperti SKTM, Kartu Keluarga, dan bukti penghasilan. Namun,

verifikasi lapangan sangat jarang dilakukan karena keterbatasan SDM dan waktu. Akibatnya, seleksi belum sepenuhnya menjamin bahwa penerima program benar-benar berasal dari keluarga yang paling membutuhkan.

Untuk proses monitoring, belum tersedia sistem untuk menilai keberlangsungan studi mahasiswa penerima KIP Kuliah secara sistematis. Pemantauan dilakukan secara umum melalui laporan akademik semesteran, tanpa mekanisme khusus untuk memantau kendala sosial, psikologis, atau ekonomi mahasiswa.

Kesimpulannya yaitu adanya ketidakseimbangan antara prosedur yang dirancang dan realitas pelaksanaan menyebabkan proses pengelolaan program menjadi kurang efektif. Sosialisasi yang terbatas mempersempit akses informasi, dan seleksi manual meningkatkan risiko ketidaktepatan sasaran.

4. *Product* (Hasil/Manfaat Program)

Secara umum, Program KIP Kuliah telah memberikan manfaat bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten. Banyak mahasiswa penerima bantuan yang merasa terbantu secara ekonomi dan mampu melanjutkan pendidikan tanpa tekanan biaya. Beberapa dari mereka menunjukkan peningkatan motivasi belajar dan prestasi akademik yang stabil. Beberapa juga terlibat aktif dalam kegiatan organisasi kampus karena tidak terbebani kebutuhan finansial dasar.

Namun demikian, masih terdapat mahasiswa penerima yang mengalami penurunan performa akademik, bahkan ada yang drop out. Hal ini tidak semata karena faktor pengelolaan program, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan keluarga, keharusan bekerja sambil, atau kurangnya dukungan non-akademik. Di sisi lain, belum ada evaluasi menyeluruh dari pihak kampus untuk mengukur dampak jangka panjang dari program terhadap peningkatan kapasitas mahasiswa penerima.

Dan hasil program menunjukkan keberhasilan parsial. Di satu sisi, bantuan finansial berhasil meringankan beban ekonomi mahasiswa. Di sisi lain, tanpa pendampingan sosial dan akademik, tidak semua mahasiswa penerima dapat memaksimalkan peluang yang diberikan.

Metode Penelitian

Pada Penelitian ini Peneliti mengkaji lebih dalam dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang Strategi untuk meningkatkan Integritas dan akses pendidikan pada Program Kip Kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten menggunakan teori model evaluasi CIPP yang terdiri dari empat komponen seperti *Context* untuk Kebutuhan, masalah, dan tujuan program di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Input untuk Sumber daya (manusia, keuangan, sistem) yang digunakan untuk menjalankan program, Process untuk Implementasi program (sosialisasi, seleksi, pendataan, monitoring), sedangkan Product untuk Hasil program, termasuk manfaat yang dirasakan mahasiswa dan pencapaian output. Dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif seperti melakukan sebuah observasi kepada partisipan secara langsung untuk mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi dalam hidup partisipan tersebut (Creswell, 2016).

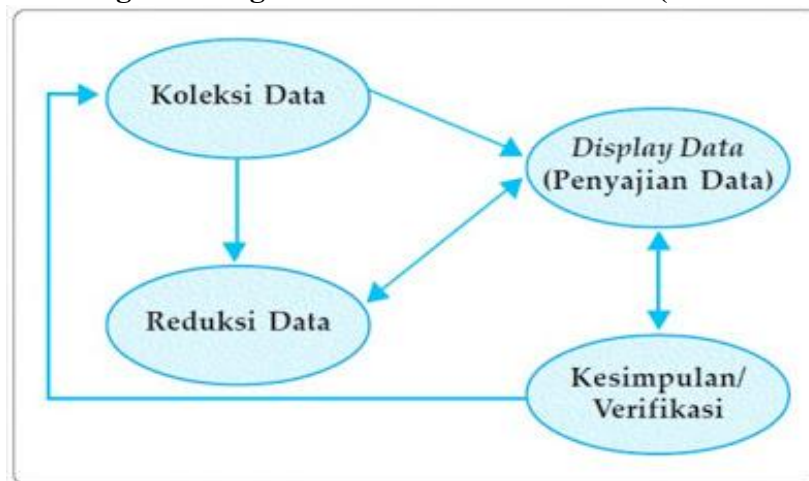
Serta dengan memfokuskan pada pendalaman sebuah Strategi untuk meningkatkan Integritas dan akses pendidikan melalui Program Kip Kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten melalui subyek dan sumber informasi seperti benda atau orang serta tempat melekatnya sebuah sumber data tersebut. Penelitian ini pun menggunakan teknik Purposive sampling seperti penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Atau dapat dikatakan teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian dalam perumusan kriterianya, subjektivitas dan pengalaman peneliti (Saleh, 2017).

Pada penentuan sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling tersebut, peneliti menentukan beberapa sumber informan yang terdiri dari Informan kunci, seperti Kepala Tim Pengelola Program Kip Kuliah, Operator Sistem Kip Kuliah, untuk Informan utama yang terdiri dari Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, dan anggota Tim Pengelola Program Kip Kuliah, serta Informan Tambahan yang terdiri dari Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu administrasi Banten sebagai Penerima manfaat Program Kip Kuliah.

Agar sebuah kredibilitas informasi dalam penelitian dapat dipercaya, maka dilakukannya sebuah validitas data oleh peneliti dengan menggunakan instrumen

wawancara secara langsung dimana wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan sebuah pedoman wawancara dengan jumlah pertanyaan yang di sesuaikan dengan indikator sebuah teori dalam penelitian serta dilakukannya sebuah teknik pengumpulan data dengan berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara seperti *natural setting*, diskusi pengumpulan data (studi Pustaka) serta teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi mulai dari triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Dengan teknik analisa data menggunakan *Interactive Model* menurut Milles Huberman dalam (Ahyar, 2020) seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 4. Langkah-Langkah Analisis Data Kualitatif (*Interactive Model*)



Sumber : Milles Huberman dalam (Ahyar, 2020)

Pada gambar di atas terdiri dari teknik analisa data menurut Milles Huberman dalam (Ahyar, 2020) di mana komponen dalam analisa data tersebut terdiri dari teknik *Collection Data* ; dimana pengumpulan data sebanyak-banyaknya yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan observasi awal yang dilakukan terkait kebutuhan penelitian. *Reduction Data* yaitu Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak maka perlu dicatat secara teliti dan rinci bertujuan untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. *Display Data* di gunakan untuk menyajikan data yang telah di reduksi agar tersusun dan terorganisasikan dengan saling terhubung agar mudah di pahami. *Conclusion* di gunakan untuk menarik kesimpulan dari semua tahapan teknik dalam penelitian ini agar hasil dan data yang di dapatkan menjadi kredibel dan lebih valid.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan model CIPP, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Program KIP Kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Banten secara umum sudah berjalan sesuai dengan pedoman yang berlaku, namun masih menghadapi berbagai tantangan di setiap komponen evaluasi. Dari segi konteks, program ini dinilai sangat relevan dengan kebutuhan mahasiswa STIA Banten yang mayoritas berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Namun, masih terdapat kendala dalam penetapan sasaran penerima bantuan, terutama karena tidak semua calon mahasiswa yang layak secara ekonomi tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pada aspek input, kapasitas sumber daya manusia pengelola program masih terbatas dan belum didukung oleh sistem digitalisasi yang memadai. Hal ini berdampak pada proses pengelolaan yang masih dilakukan secara manual dan berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi serta keterlambatan dalam pelayanan. Dari sisi proses, pelaksanaan program seperti sosialisasi, seleksi, dan monitoring belum berjalan optimal. Sosialisasi masih bersifat pasif, seleksi administratif minim verifikasi lapangan, serta belum adanya sistem pemantauan yang sistematis terhadap kondisi sosial dan akademik mahasiswa penerima. Meskipun demikian, manfaat dari program ini tetap dirasakan oleh mahasiswa, terutama dalam hal meringankan beban ekonomi, meningkatkan motivasi belajar, dan partisipasi dalam kegiatan kampus. Namun, tanpa adanya pendampingan akademik dan psikososial yang memadai, sebagian mahasiswa masih menghadapi risiko penurunan performa hingga putus kuliah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program, diperlukan penguatan kapasitas tim pengelola, pengembangan sistem informasi digital yang terintegrasi, serta peningkatan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif terhadap dampak program.

Daftar Pustaka

- Ahyar, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Husnu abadi (Ed.); pertama). CV. pustaka Ilmu.
- Aidah, N. A. (2022). Analisis Kebijakan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (Kip-K) Di Universitas Diponegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi*

- Kebijakan (JIASK)*, 5(1), 1–22. <https://doi.org/10.48093/jiask.v5i1.91>
- Asih, N. (2016). Evaluasi Model Stake Pada Pelaksanaan Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Dalam Kurikulum 2013 Di Smp 1 Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2015/2016. *Evaluasi Model Stake Pada Pelaksanaan Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Dalam Kurikulum 2013 Di Smp 1 Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2015/2016*, 238.
- Bhakti, y. B. (2017). *Evaluasi program model cipp pada proses*. 1(2), 75–82.
- Buku Panduan Proses Pemulihan atau Reklain Akun Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), 2024 <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id>. *Pulapdik Kemendikbudristek*.
- Cahyani, E. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(2), 79–89. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15527>
- Cahyani, T. D., Al-fatih, S., Hukum, F., Muhammadiyah, U., Korupsi, T. P., & Pendahuluan, A. (2020). *Peran muhammadiyah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di kota batu*. 4(2), 117–123. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.14>. Volume
- Creswell. (2016). *Metodologi Penelitian*. 01, 1–23.
- Dewi, G. K. S. (2022). Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(4), 123–132.
- Efektivitas Penerapan E-Government dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Daerah*. (2015). 1(2).
- Ekonomi, J., dan Akuntansi, M., Andari, W., Utami, R., & Izmi Diniaty, S. (2024). *Neraca Analisis Implementasi Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (Kip-K) Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi Di Universitas Bina Sarana Informatika*. 500(8), 500–506.
- Handoyo, E. (2010). Kebijakan Publik sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2(3), 78–91.
- Hukum, K., Dalam, P., Penanggulangan, U., Pidana, T., & Di, K. (2024). *19 Juni 2024*. 2, 116–130.
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). *PREVENTION OF CORRUPTION IN*

MANAGEMENT OF. 6(3).

- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98.
- Malik Ibrahim, M. (2018). Penelitian Evaluasi Bidang Pendidikan (Pendekatan Kualitatif). In *Alauddin University Press, Makassar*.
- Maulana, M. I., & Ismunarno, I. (2023). Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dengan Cara Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 11(2), 295. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i2.80597>
- Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik*.
- Nugroho, A., Hakim, A. L., Handoko, P., Sanjaya, N., Mulyani, I., & Hadiono, A. (2023). Evaluasi Program Flood Management in Selected River Basins Di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Inovasi Daerah*, 2(1), 78–95. <https://doi.org/10.56655/jid.v2i1.86>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.
- Pidana, S. P. (2004). *Keywords: Kewenangan Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Sistem Peradilan Pidana*.
- Program, J., Pendidikan, S., Volume, S., Sejarah, P., Keguruan, F., Pendidikan, I., Yogyakarta, U. P., No, S., Penelitian, A., Cipp, M., Cipp, M., Kunci, K., Cipp, M., & Sejarah, P. (2020). *Evaluasi Program Pembelajaran Sejarah Menggunakan Model Context , Input , Process , Product (CIPP)*. 8(2).
- Rahim, A. (2019). *Arhjayati Rahim*. 3(1), 29–52.
- Rakista, P. M. (2021). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP). *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 224–232. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2774>
- Rantung, M. I. R. (2024). Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep dan Model). *Tahta Media Group*, 1–110. <http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/733>
- Rini, P. P., Muhyidin, A., & Atikah, C. (2024). *Peran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Dalam Meningkatkan Kesetaraan Pendidikan Tinggi (Studi Kasus Universitas Salakanagara)*. 6(2), 119–126.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif* (U. Hamzah (Ed.); pertama). Pustaka Ramadhan.

- Sirajuddin Saleh. (2017). Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. *Analisis Data Kualitatif*, 1, 180.
- Situmorang, M. I. (2022). Efektivitas Penggunaan Kartu Indonesia Pintar Dalam Memperkuat Jaminan Pendidikan Bagi Masyarakat Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 8.
- Stai, D., Falah, A., & Prodi, B. (2019). *Hal ini telah diisyaratkan oleh Allah Swt. dalam al- Qur'an surah al-Luqman ayat 27 dan surah al-kahfi ayat 109*. 2(2), 66–75.
- Studi, P., Pendidikan, M., Ilmu, F., Dan, T., & Hidayatullah, U. I. N. S. (2022). *EVALUATION OF DISTANCE LEARNING FACULTY OF TARBIYA AND TEACHER ' S TRAINING*.
- Sudarsono, E., Pendukung, S., Untuk, K., Ahp, M., & Saw, D. A. N. (2022). *Sistem pendukung keputusan untuk penentuan penerima kip kuliah menggunakan metode ahp dan saw*. 14(2), 136–143.
- Suganda, G., Asfi, M., Subagio, R. T., & Kusuma, R. P. (2022). *BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH MENGGUNAKAN NAÏVE*. 9(2), 193–199. <https://doi.org/10.30656/jsii.v9i2.4376>
- Suryasuciramdhan, A., Meliasari, M., Ifada, B. M., Faidh, M. A., Studi, P., Komunikasi, I., Ilmu, F., & Politik, I. (2024). *Analisis Framing Dalam Kasus Penyalahgunaan Kip Kuliah Mahasiswi Universitas Diponegoro Di Media Sosial X Dan Media Online Kompas . Tv*. 2(3).
- Tefa, G. (2016). Penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Politikologi*, 3(1), 67–79.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Transparency International Indonesia (TII), 2023 The Global Coalition against Corruption.
- Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 25–32. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912>
- Yuliana, D. T., Fathoni, M. I. A., Kurniawati, N., Nahdlatul, U., Sunan, U., Ahmad, J., & No, Y. (2022). *Penentuan Penerima Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah dengan Menggunakan Metode K-Means Clustering*. 5(1), 127–141. <https://doi.org/10.30762/f>